

PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM MODERAT

Siti Mabruroh¹, Mashfiyatus Shidqiyyah², Diana Puspita Kusuma Wardani³

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

sitimabruroh193@gmail.com

Abstrak

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika sosial, budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kajian mengenai perkembangan kurikulum yang secara khusus mengaitkannya dengan relevansi pendidikan Islam moderat masih perlu diperkuat, terutama dalam melihat kesinambungan nilai moderasi dari berbagai periode kurikulum hingga Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam moderat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi terkait perkembangan kurikulum di Indonesia serta literatur mengenai pendidikan Islam moderat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, sedangkan data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami pergeseran dari orientasi pembentukan karakter dan nasionalisme menuju kurikulum yang lebih sistematis, berbasis kompetensi, berpusat pada peserta didik, serta menekankan penguatan karakter. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki relevansi paling kuat dengan pendidikan Islam moderat melalui penekanan pada pendidikan karakter, toleransi, keseimbangan, sikap inklusif, keterlibatan aktif peserta didik, dan kemampuan hidup dalam keberagaman. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan perkembangan kurikulum secara historis dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka dalam satu kajian yang dianalisis secara khusus melalui perspektif pendidikan Islam moderat, sehingga menunjukkan adanya kecenderungan penguatan nilai-nilai moderasi dalam arah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia.

Kata kunci: perkembangan kurikulum, kurikulum Indonesia, pendidikan Islam moderat, moderasi beragama, Kurikulum Merdeka.

Abstract

Curriculum changes in Indonesia represent responses to social, cultural, political, and scientific and technological developments. However, studies that specifically examine curriculum development in relation to the relevance of moderate Islamic education still need to be strengthened, particularly in identifying the continuity of moderation values across different curriculum periods up to the Merdeka Curriculum. This study aims to analyze the development of the Indonesian education curriculum from the 1947 Curriculum to the Merdeka Curriculum

and to examine its relevance to the principles of moderate Islamic education. This study employed a qualitative approach using library research. The data were obtained from scientific journals, official documents concerning curriculum development in Indonesia, and literature related to moderate Islamic education. Data were collected through documentation studies and analyzed using descriptive-analytical techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that curriculum development in Indonesia has shifted from an emphasis on character and nationalism toward a more systematic, competency-based, student-centered curriculum that emphasizes character development. The 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum demonstrate the strongest relevance to moderate Islamic education through their emphasis on character education, tolerance, balance, inclusiveness, active student participation, and the ability to live within diversity. The novelty of this study lies in mapping curriculum development historically from the 1947 Curriculum to the Merdeka Curriculum and examining the entire development through the specific perspective of moderate Islamic education. This approach demonstrates a continuing tendency toward strengthening moderation values within the development of Indonesia's educational curriculum. Keywords: Curriculum development, Indonesian curriculum, moderate Islamic education, religious moderation, Merdeka Curriculum.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman berlangsung dengan sangat cepat dan membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada bidang teknologi dan informasi, tetapi juga pada pola pikir, perilaku, serta kebutuhan sosial yang semakin kompleks. Selain itu, perubahan juga memengaruhi gaya hidup, nilai moral, seni, hingga praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, satuan pendidikan memiliki peran strategis untuk mampu beradaptasi serta merespons berbagai perubahan tersebut secara tepat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk adaptasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Melalui kurikulum, arah, isi, serta proses pembelajaran dirancang secara sistematis agar mampu menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan harapan Pendidikan. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, baik bagi pendidik dalam mengajar maupun bagi lembaga pendidikan dalam menyusun program pembelajaran (Hidayat et al., 2025). Dengan demikian, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keberhasilan suatu proses pendidikan.

Kurikulum pendidikan senantiasa mengalami perubahan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, baik

dalam aspek budaya, ekonomi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kurikulum bersifat dinamis dan adaptif guna menjawab kebutuhan zaman serta relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang.

Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada Kurikulum Pendidikan di Indonesia sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1947. Hingga saat ini, tercatat lebih dari sepuluh kali perubahan kurikulum, baik dalam bentuk pembaruan secara menyeluruh maupun penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya (Paramita et al., 2025). Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Dengan demikian, dinamika perubahan kurikulum menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan kurikulum juga perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan Islam moderat menekankan sikap tengah (tawasuth), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan keadilan (i'tidal) dalam kehidupan beragama (Arikarani et al., 2024). Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, agar peserta didik tidak terjebak pada sikap ekstremisme maupun radikalisme. Oleh karena itu, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter yang moderat dan inklusif.

Namun demikian, tidak semua perubahan kurikulum secara langsung mencerminkan nilai-nilai moderasi tersebut. Setiap periode kurikulum memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zamannya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia serta sejauh mana kurikulum tersebut relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam moderat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka, serta bagaimana relevansinya dalam perspektif pendidikan Islam moderat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan berfokus pada analisis

perkembangan kurikulum di Indonesia serta relevansinya dengan konsep pendidikan Islam moderat melalui berbagai sumber literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah serta dokumen resmi terkait kurikulum pendidikan di Indonesia, seperti Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Selain itu, referensi yang digunakan juga mencakup literatur yang membahas konsep pendidikan Islam moderat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan karakter.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan perkembangan kurikulum di Indonesia secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam moderat.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia serta relevansinya dengan pendidikan Islam moderat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Proses perkembangan kurikulum di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada periode tersebut, penyusunan dan isi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan budaya pemerintah kolonial. Akibatnya, kurikulum yang diterapkan cenderung mencerminkan ideologi serta kebutuhan penjajah, bukan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum sejak awal memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika kekuasaan dan kondisi sosial budaya yang berkembang pada masanya (Paramita et al., 2025).

Pasca kemerdekaan yaitu 1947 kurikulum nasional mulai dirancang sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, kurikulum pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang

mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai lokal. Selain itu, pengembangan kurikulum juga didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan utama dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

a) Kurikulum tahun 1947 (Rencana Pelajaran)

Kurikulum tahun 1947, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *leerplan* (rencana pelajaran), merupakan kurikulum pertama yang diterapkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, belum menggunakan istilah kurikulum akan tetapi disebut sebagai Rencana Pelajaran. Sistem pendidikan masih menunjukkan pengaruh kolonial Belanda yang cukup kuat. Kurikulum ini lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter peserta didik, khususnya dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, dibandingkan pada pengembangan aspek kognitif atau kecerdasan akademik (Insani, 2019).

Dalam implementasinya, Kurikulum 1947 menggunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa daerah dan Bahasa Indonesia. Selain itu, struktur mata pelajaran disusun secara terpisah-pisah (*separated curriculum*), yang mencakup berbagai bidang seperti Bahasa Indonesia, bahasa daerah, matematika, ilmu alam (fisika dan kehidupan), geografi, sejarah, seni suara, kerajinan tangan, keterampilan khusus seperti pekerjaan perempuan, pendidikan jasmani, kesehatan dan kebersihan, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tersebut masih bersifat sederhana, namun telah berupaya mengakomodasi kebutuhan pembentukan karakter dan identitas bangsa pada masa awal kemerdekaan (Febriyenti et al., 2023).

b) Kurikulum tahun 1952 (Rencana Pelajaran Terurai)

Rencana Pelajaran 1947 pada praktiknya mulai diterapkan pada tahun 1950, kemudian disempurnakan pada tahun 1952 menjadi Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini memiliki ciri utama berupa penekanan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bersifat kontekstual dan aplikatif (Paramita et al., 2025).

Selain itu, kurikulum ini mulai menunjukkan upaya pengembangan peserta didik secara lebih menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek moral, emosional, dan keterampilan. Dalam implementasinya, Rencana Pelajaran

Terurai lebih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dengan penekanan pada pembekalan keterampilan praktis yang sesuai dengan kondisi sosial dan mata pencaharian masyarakat setempat, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan (Raharjo, 2020).

Dengan demikian, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu berperan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui kelanjutan pendidikan maupun keterlibatan langsung dalam dunia kerja sesuai dengan lingkungannya.

c) Kurikulum tahun 1964 (Rencana Pendidikan Sekolah Dasar)

Kurikulum tahun 1964 merupakan hasil penyempurnaan dari Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan pada masa tersebut. Kurikulum ini dikenal dengan konsep Pancawardhana, yang menekankan pengembangan peserta didik secara menyeluruh melalui lima aspek, yaitu moral, intelektual, emosional/artistik, keterampilan (keprigelan), dan jasmani. Melalui konsep ini, pemerintah berupaya membentuk keseimbangan antara perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik (Febriyenti et al., 2023).

Dalam implementasinya, Kurikulum 1964 menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik didorong untuk bersikap aktif, kreatif, dan produktif, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (*problem solving*). Selain itu, kurikulum ini juga memberikan perhatian pada pengembangan aspek kebudayaan, kesenian, dan olahraga yang dilaksanakan secara terprogram, termasuk penetapan kegiatan khusus pada waktu tertentu dalam satu minggu.

Secara konseptual, Kurikulum 1964 dirancang sebagai instrumen untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, memiliki orientasi sosial, serta mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Tap MPRS No. II Tahun 1960. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian bangsa (Paramita et al., 2025).

d) Kurikulum tahun 1968 (Kurikulum Sekolah Dasar)

Kurikulum tahun 1968 disusun sebagai pengganti Kurikulum 1964 yang dianggap merepresentasikan kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama.

Kurikulum ini dirancang dengan berlandaskan pada UUD 1945 serta berorientasi pada pembinaan jiwa Pancasila. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan konsep *Pancawardhana*, Kurikulum 1968 menekankan pada tiga aspek utama, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, penguasaan pengetahuan dasar, dan pengembangan bakat khusus peserta didik.

Dalam implementasinya, Kurikulum 1968 lebih menitikberatkan pada penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis dan terstruktur. Fokus pembelajaran diarahkan pada penguasaan konten yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dasar peserta didik, serta pembinaan aspek jasmani guna membentuk individu yang sehat dan bugar. Dengan demikian, Kurikulum 1968 mencerminkan upaya pemerintah dalam membentuk manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta memiliki kemampuan dasar yang memadai (Febriyenti et al., 2023)

e) Kurikulum tahun 1975

Kurikulum tahun 1975 disusun dengan penekanan pada pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen modern, khususnya *Management by Objectives* (MBO), yang menekankan pentingnya perumusan tujuan secara jelas dan terukur dalam setiap proses pendidikan. Selain itu, kurikulum ini juga mengadopsi pendekatan psikologi belajar, seperti teori Gestalt, yang menekankan bahwa pemahaman harus didahulukan sebelum latihan hafalan (*drill*) diberikan kepada peserta didik (Paramita et al., 2025).

Dalam implementasinya, Kurikulum 1975 menggunakan pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan *Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional* (PPSI). Setiap kegiatan pembelajaran dirancang secara rinci dalam bentuk satuan pelajaran yang mencakup tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, media atau alat pembelajaran, kegiatan belajar-mengajar, serta evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Febriyenti et al., 2023).

Meskipun demikian, Kurikulum 1975 juga menuai berbagai kritik, terutama dari kalangan pendidik. Guru dinilai terbebani oleh tuntutan administratif yang cukup tinggi, karena harus menyusun rincian tujuan dan langkah pembelajaran secara detail untuk setiap kegiatan. Akibatnya, perhatian guru sering kali lebih terfokus pada penyusunan dokumen pembelajaran dibandingkan pada pelaksanaan pembelajaran itu sendiri (Paramita et al., 2025).

f) Kurikulum tahun 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan)

Kurikulum tahun 1984 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 dengan mengedepankan pendekatan proses dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984 dikenal dengan istilah *Cara Belajar Siswa Aktif* (CBSA), yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif melalui berbagai kegiatan, seperti mengamati, mengelompokkan, berdiskusi, hingga menyampaikan hasil pembelajaran

Penerapan CBSA tidak selalu berjalan optimal. Beberapa sekolah mengalami kendala dalam memahami konsep dan strategi pelaksanaannya, sehingga pembelajaran yang diharapkan aktif dan terarah justru tidak terlaksana secara efektif. Dalam beberapa kasus, kondisi kelas menjadi kurang kondusif dan tidak mencerminkan tujuan utama dari pendekatan tersebut (Febriyenti et al., 2023).

g) Kurikulum tahun 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil penyempurnaan dari Kurikulum 1975 dan 1984 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu ciri utama kurikulum ini adalah digunakannya sistem caturwulan, yaitu pembagian waktu belajar dalam satu tahun menjadi tiga tahap, dengan harapan materi pembelajaran dapat disampaikan secara lebih terstruktur.

Kurikulum ini berorientasi pada penguasaan materi pelajaran serta keterampilan dalam menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selain itu, kurikulum juga memuat muatan nasional dan muatan lokal, di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan lokal.

Pelaksanaan Kurikulum 1994 mendapat berbagai kritik, terutama karena beban materi yang terlalu padat sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Di

samping itu, kurikulum ini juga dipengaruhi konsep *link and match* yang menekankan keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja, meskipun dinilai masih kurang memperhatikan keseimbangan aspek kemanusiaan peserta didik.

h) Kurikulum tahun 2004

Perubahan kurikulum kembali dilakukan sebagai respons terhadap transformasi sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menuju desentralistik. Dalam konteks tersebut, pada tahun 2004 diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan agar peserta didik mampu mencapai kompetensi tertentu pada setiap jenjang pendidikan. Kompetensi yang dimaksud mencakup perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam pola berpikir dan bertindak (Adam et al., 2023).

Kurikulum Berbasis Kompetensi menekankan pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Proses pembelajaran tidak lagi berfokus pada penguasaan materi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam hal ini, pembelajaran mulai berorientasi pada siswa (*student-centered*), dengan penggunaan berbagai metode dan sumber belajar yang tidak hanya bergantung pada guru.

Sistem penilaian dalam KBK menekankan pada proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kurikulum ini juga memberikan ruang bagi penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada pengembangan kompetensi individu, penggunaan pendekatan pembelajaran yang beragam dan kontekstual, serta orientasi pada proses dan hasil belajar. Dengan demikian, KBK menjadi langkah awal dalam pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia dari yang berorientasi pada materi menuju pengembangan kompetensi peserta didik secara lebih menyeluruh (Febriyenti et al., 2023).

i) Kurikulum tahun 2006

Pada tahun 2006, pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dihentikan dan digantikan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pergantian ini merupakan implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam penerapannya, KTSP disusun dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Penilaian Pendidikan (Mutiara et al., 2024).

Pengembangan KTSP dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekitar. Kurikulum ini mencakup komponen wajib seperti muatan lokal dan pengembangan diri yang dirancang secara terpadu dan beragam. Selain itu, KTSP juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman peserta didik, baik dari aspek agama, suku, budaya, maupun latar belakang sosial, sebagai bentuk implementasi nilai toleransi dalam Pendidikan (Paramita et al., 2025).

j) Kurikulum tahun 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum ini menekankan pada penguatan pendidikan karakter dengan tujuan membentuk peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap dan nilai moral yang baik sesuai dengan standar kompetensi lulusan (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, bertanya, menalar, dan mengomunikasikan hasil belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Paramita et al., 2025).

Kurikulum 2013 juga menekankan keseimbangan antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sistem penilaian yang digunakan bersifat autentik, yaitu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran peserta didik

secara menyeluruh. Dengan demikian, kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman (Febriyenti et al., 2023).

k) Kurikulum Merdeka (2022)

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka juga mengusung prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel, mandiri, aktif, dan bermakna. Hal ini tercermin dalam kebijakan *Merdeka Belajar* yang mencakup penyederhanaan perencanaan pembelajaran, penggantian sistem evaluasi nasional menjadi asesmen kompetensi, serta penguatan peran guru sebagai penggerak dalam proses Pendidikan.

Kurikulum ini menekankan penguatan karakter melalui program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagi madrasah, pendekatan ini juga selaras dengan konsep Profil Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin (Paramita et al., 2025).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, seperti fleksibilitas pembelajaran dan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja, Kurikulum Merdeka juga menghadapi beberapa kendala, terutama dalam kesiapan sumber daya manusia dan kebutuhan pelatihan yang memadai bagi pendidik. Oleh karena itu, implementasi kurikulum ini memerlukan dukungan yang optimal agar dapat berjalan secara efektif (Febriyenti et al., 2023).

Pendidikan Islam Moderat dan Relevansinya dengan Kurikulum di Indonesia

Pendidikan Islam moderat merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang seimbang, toleran, dan inklusif dalam proses pembelajaran. Pendidikan Islam moderat berlandaskan pada prinsip Ahlul sunnah wal Jama’ah yang menekankan sikap tengah (*tawasuth*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), dan keadilan (*i’tidal*). Melalui prinsip tersebut, peserta didik diarahkan untuk memiliki pemahaman keagamaan yang tidak ekstrem serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk (Arifin & Huda, 2024)

Tujuan utama pendidikan Islam moderat adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki sikap toleransi, serta mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu agama secara kognitif, tetapi juga menekankan pembentukan karakter melalui pembiasaan dan keteladanan (Maulida & Hikmah, 2025). Dengan demikian, pendidikan Islam moderat berupaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

Peran guru sangat penting dalam penerapan Pendidikan Islam moderat ini. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari (Dzakiyah & Farih, 2025). Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat dan berakhlak mulia.

Perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang semakin selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam moderat. Pada awalnya, kurikulum lebih berfokus pada pembentukan karakter dan nasionalisme, kemudian berkembang menjadi lebih terstruktur dan berorientasi pada tujuan pembelajaran. Seiring waktu, kurikulum mulai menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik, pengembangan kompetensi, serta pembentukan karakter.

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka merupakan bentuk kurikulum yang paling relevan dengan konsep pendidikan Islam moderat. Hal ini terlihat dari penekanan pada penguatan pendidikan karakter, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pengembangan sikap sosial dan toleransi. Nilai-nilai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Kurikulum Merdeka, khususnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter melalui pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Program seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi, berpikir kritis, serta mampu berinteraksi dalam masyarakat yang beragam. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam moderat dalam membentuk individu yang seimbang antara aspek intelektual, spiritual, dan sosial (Paramita et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan Islam moderat. Kurikulum tidak lagi hanya

berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, sikap toleransi, serta kemampuan hidup dalam keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan di Indonesia semakin mendukung terwujudnya nilai-nilai moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya dinamika yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang pada awalnya berorientasi pada pembentukan karakter dan nasionalisme, secara bertahap berkembang menjadi lebih sistematis, berbasis tujuan, hingga akhirnya mengarah pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kompetensi, serta penguatan pendidikan karakter. Perubahan tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar lebih relevan dengan tuntutan zaman.

Dalam perspektif pendidikan Islam moderat, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan tingkat relevansi yang semakin kuat, terutama pada kurikulum modern seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Hal ini terlihat dari penekanan pada nilai-nilai toleransi, keseimbangan, sikap inklusif, serta pembentukan karakter peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang moderat. Dengan demikian, arah perkembangan kurikulum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mendukung terwujudnya nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Ternate, I., & Indonesia, M. U. (2023). Analilis Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia. 9(6), 723–735.
- Arifin, B., & Huda, H. (2024). Moderasi beragama sebagai pendekatan dalam pendidikan Islam Indonesia. TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(2), 143–154.
- Arikarani, Y., Azman, Z., Aisyah, S., Ansyah, F. P., & Kirti, T. D. Z. (2024). Konsep pendidikan Islam dalam penguatan moderasi beragama. Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, 7(1), 71–88.
- Dzakriyah, A., & Farih, M. (2025). Peran Guru dalam Memasyarakatkan Pendidikan Islam Moderat. 4(2), 9131–9136.

- Febriyenti, D., Putri, N., Asmendri, & Sari, M. (2023). PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. 7(September).
- Hidayat, A., Pahrudin, A., & Rahmi, S. (2025). Struktur dan prosedur pengorganisasian kurikulum untuk pembelajaran berkualitas. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 265–280.
- Insani, F. D. (2019). SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI. *As Salam I*, 8, 43–64.
- Maulida, N. N., & Hikmah, N. (2025). Analisis Konsep, Nilai, dan Strategi Efektif dalam Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(02), 458–469.
- Mutiara, A., Lestari, E., Pisma, V. Al, & Tirtayasa, A. (2024). Sejarah Perkembangan Kurikulum Sebagai Peran Penting dalam Pendidikan di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 3 (1).
- Paramita, E., Ratnasari, D., & Husna, A. (2025). Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia. 5, 169–184.
- Raharjo, R. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1947 sampai dengan merdeka belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan kurikulum terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–12.